

## IT & ELEKTRONIK

## HP, GADGET, DIGITAL, STUDIO FOTO, ELEKTRONIK, PERALATAN & PERABOTAN KANTOR

www.computa.co.id  
Google | Computa Jogja

38

BELANJA KEBUTUHAN IT  
LAPTOP | PC DESKTOP & AIO | PC TABLET | PRINTER  
PROYEKTOR | HDD EKSTERNAL | AKSESORIS

TETAP  
**AMAN**  
Makin  
**NYAMAN**

SHOWROOM COMPUTA  
LEBIH LUAS & LEGA  
(MENYERAPKAN PHYSICAL DISTANCING)

HARGA TERJANGKAU

PILIHAN LENGKAP

BELANJA KOMPUTER  
Asyik!

computa  
The Real Computer Center

0817 940 8127

Kedaulatan Rakyat  
**EPAPER**  
www.kr.co.id

Berlangganan  
Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat  
juga hadir dalam format koran digital  
atau electronic paper (epaper).  
Silakan berliber-berliber. Kedaulatan Rakyat  
dapat Anda nikmati melalui genggaman  
tangan Anda. Sekarang.

**KR RADIO**  
107.2 FM

Media Informasi & Hiburan

High Light KR Radio

- Sewarna
- Jogja KR
- Bening Hati
- Info Musik
- Beades Mania
- Kaweruh Basa Jawa
- KR Diskografi
- Drama Radio
- Kaerindie
- Gardoe Jaga
- Kopi Pagi

Pemasaran :  
Jl. Margo Utomo / P. Mangkubumi No. 40 - 46  
Jogjakarta Telp./Fax : 0274 550 891  
Studio :  
Jl. Veteran No. 16 Wates Kulon Progo  
D.I. Yogyakarta

krjogja.com  
Lebih Mengerji Jogja

dari  
**JOGJA**  
untuk  
**DUNIA**

Redaksi:  
Jl. P. Mangkubumi No. 40-46  
Yogyakarta 55232  
redaksi@krjogja.com  
Telp : +62 274 315 5542

Ikutan:  
akun@krjogja.com  
Telp : +62 274 550 892  
Fax : +62 274 550 890

www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat  
**POJOK DIGITAL**  
IT & ELEKTRONIK

- HP
- KOMPUTER
- GADGET
- DIGITAL
- ELEKTRONIK
- KAMERA / STUDIO FOTO
- PERALATAN & PERABOTAN KANTOR MODERN

Setiap  
**Kamis**

Hanya di :  
**Kedaulatan Rakyat**



# Pranatan Anyar



## SAKSI

### VAKSINASI PELAYANAN PUBLIK

## Sasar 23.000 Orang, Tunggu Kiriman Vaksin

**KULONPROGO (KR)** - Vaksinasi untuk pelayanan publik di Kabupaten Kulonprogo menasar sekitar 23.000 orang, meski begitu data ini masih bergerak. Vaksinasi bagi pelayanan publik akan dimulai Maret mendatang dan saat ini masih menunggu kedatangan kiriman vaksinnya.

"Yang masuk dalam pelayanan publik meliputi pegawai Pemerintah, TNI/Polri, guru, pelaku pariwisata, wartawan, pedagang pasar, transportasi umum, ojek, dan lainnya. Untuk pedagang, jumlah yang masuk 3.500 orang dari pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo drg Banih Rahayujati MKes, Rabu (24/2).

Menurut Banih, data tersebut masih terus bergerak, karena sebelumnya tercatat 19.000, kemudian bertambah men-

jadi 23.000, dan itu pun belum final karena masih menunggu data dari instansi vertikal.

Vaksinasi, dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo dr Sri Budi Utami MKes, sudah memasuki pekan keempat, dan saat ini masih menyelesaikan untuk tenaga kesehatan (nakes). "Begitu vaksin datang untuk pelayanan publik ini berapapun jumlah vaksin akan langsung kita laksanakan, diprioritaskan yang garda terdepan atau yang langsung menyentuh pelayanan publik," ucapnya.

Sri Budi menjelaskan, sesuai perintah Kemenkes, sekarang vaksinasi ada kelonggaran, yakni usia lebih dari 60 tahun, hipertensi boleh 180/110 tapi waktu skrining kondisinya harus baik. Demikian pula dengan diabetes melitus (penyakit gula) boleh divaksin asal kondisinya terkontrol, dan pengobatan rutin.

(Wid)-f

## SAKSI

### 'REFOCUSING' ANGGARAN

## Harus Mampu Tekan Kasus Covid-19

**YOGYA (KR)** - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DIY sedang melakukan *refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran ini harus mampu menekan kasus Covid-19 di DIY.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta, Rabu (24/2). Menurutnya, menekan penambahan kasus Covid-19 harus dijadikan indikator penggunaan anggaran yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT). Apalagi pada APBD 2021, DIY telah menganggarkan Rp 66,9 miliar untuk penanganan Covid-19.

Pemda DIY atas arahan Kementerian Keuangan mengeluarkan edaran untuk menambah alokasi anggaran penanganan Covid-19 dalam BTT sebesar 8 persen dari setiap SKPD atau setara nominal kurang

lebih Rp 125 miliar. Dengan tambahan anggaran hasil *refocusing* ini BTT akan menjadi sekitar Rp 191 miliar untuk penanganan Covid-19.

"Dipergunakan untuk berbagai program. Seperti vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, pencegahan, dukungan posko dan sebagainya. Kami minta harus ada indikator yang jelas dan mudah dinilai terkait penggunaan anggaran tersebut. Yaitu penurunan kasus harian Covid-19 secara signifikan dalam tahun 2021 dan seterusnya," katanya.

Disampaikan, jangan sampai indikator keberhasilan hanya sekadar

terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi kasus Covid-19 tetap tinggi.

Huda menambahkan, terkendalinya kasus Covid-19 akan menjadi kunci perbaikan perekonomian yang saat ini terpuruk. Untuk itu program-program yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan efisien, sehingga belanja anggaran akan memberikan dampak langsung terhadap pengendalian kasus dan perbaikan ekonomi.

"Kami mengapresiasi turunnya kasus Covid-19 di PTKM Tahap 3 ini. Dari sekitar 320-an kasus harian di PTKM Tahap 1 menjadi sekitar 200-an kasus perhari di PTKM Tahap 3. Tapi kasus ini masih tetap saja tinggi, sehingga perlu dilakukan lanjutan PTKM Tahap 4," ujarnya. (Awh)-f

## SAKSI

### GUBERNUR JATENG USULKAN RP 3,19 T

## Penanganan Banjir Pantura Jadi Prioritas

**SEMARANG (KR)** - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar penanganan banjir dan rob di Pantai Utara (Pantura) Jateng menjadi prioritas dengan anggaran sebesar Rp 3,19 triliun.

"Sebenarnya ada banyak usulan ke Pusat, ada *project-project* strategis yang kami dorong, namun untuk kali ini, saya ingin prioritaskan bagaimana penanganan banjir di Pantura. Ini yang paling penting yang mesti segera dibereskan," kata Ganjar di Semarang, Rabu (24/2). (Berita terkait di Halaman 6).

Usulan tersebut disampaikan Ganjar kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Usulan Program Prioritas Nasional untuk Mendukung Major Project RKP 2022 secara daring.

Ganjar mengusulkan anggaran Rp 3,19 triliun itu untuk penanganan banjir dan rob di sejumlah daerah di Pantura termasuk peningkatan sarana prasarana kawasan industri yang ada di sana. "Memang di Pantura ini ada dua hal, satu soal in-

frastruktur mesti beres, tapi banjir yang paling penting. Banjir di Pantura mesti dibereskan karena ada pengamat yang bilang kondisinya cukup berbahaya, khusus di Pekalongan pengamat bilang harus cepat ditangani agar tidak tenggelam," ujarnya.

Selain Pekalongan, wilayah yang harus mendapat perhatian adalah Kota Semarang dan Kabupaten Demak karena menurut Ganjar,

lokasi-lokasi itu butuh penanganan yang sifatnya khusus, meskipun tidak boleh mengesampingkan wilayah lain. "Yang lain sebenarnya juga kami siapkan di level daerah, tapi karena ini dengan Pusat, kami butuh bantuan penanganan di wilayah-wilayah itu," katanya.

Selain penanganan banjir dan rob di Pantura, Ganjar juga mengusulkan dua program prioritas lainnya, di antaranya pengembangan kawasan Objek Wisata Candi Borobudur sebagai 10 Bali Baru di Indonesia dengan total usulan anggaran Rp 1,72 triliun. Ada pula



KR-Chandra AN  
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meninjau kawasan Kota Lama, Semarang, yang terendam banjir, Rabu (24/2) pagi.

usulan sektor perumahan tidak layak huni untuk mendukung pengentasan kemiskinan dengan total anggaran Rp 1,4 triliun. "Selain itu ada peningkatan pertumbuhan eko-

nomi di kawasan industri, termasuk pemenuhan sarana prasarannya, pembangunan jalur penghubung antara Utara dan Selatan Jawa Tengah, penurunan kemiskinan,

pengangguran, aspek lingkungan dan lainnya. Memang tidak semua kami usulkan ke Pusat, karena beberapa akan kami tangani sendiri," ujarnya. (Ant)-f

## SAKSI

### KPK Apresiasi Instansi Patuh LHKPN

**JAKARTA (KR)** - Apresiasi disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 21 instansi yang telah memenuhi 100 persen kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan status kelengkapan. Menurut Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, LHKPN pada 21 instansi ini dinyatakan lengkap per 22 Februari.

"Meski batas waktu LHKPN periodik tahun pelaporan 2020 hingga 31 Maret 2021, tapi seluruh wajib lapor pada 21 instansi tersebut telah melaksanakan kewajibannya sebelum batas waktu secara tertib dan lengkap," tutur Ipi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (24/2).

Terkait hal itu, menurutnya, KPK telah melakukan verifikasi atas laporan yang disampaikan dan juga telah mengumumkannya pada laman [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Dalam hal ini, KPK juga mengapresiasi inisiatif dari beberapa instansi yang memajukan tenggat waktu pelaporan dengan beragam sanksi administratif untuk mendorong kepatuhan lapor di lingkungan instansinya.

"Itu menunjukkan satu bentuk komitmen dan langkah awal pencegahan korupsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam melaporkan kekayaannya," kata Ipi.

Disebutkan, UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN mewajibkan penyelenggara negara untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. "Oleh karena itu, penyelenggara negara yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif," kata Ipi seraya menyebutkan, hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Fu)-f

## SAKSI

### 19.897 Pedagang Jadi Sasaran Vaksinasi

**YOGYA (KR)** - Vaksinasi Covid-19 tahap kedua di DIY rencananya dimulai awal Maret 2021 mendatang. Sebanyak 19.897 pedagang di Pasar Beringharjo dan kawasan Malioboro menjadi sasaran pemberian vaksinasi tahap kedua tersebut.

Pemda DIY dengan dukungan pihak-pihak terkait terus menyelesaikan pendataan terkait vaksinasi ini, termasuk bagi pedagang di Pasar Beringharjo dan kawasan Malioboro yang akan menerima vaksinasi tahap kedua.

"Kalau untuk pendataan lebih banyak diserahkan Disperindag dan UPT Malioboro karena sasarannya di sana. Nanti Dinkes yang akan mengurus pelaksanaannya. Para pedagang Pasar Beringharjo dan kawasan Malioboro akan diskriming dalam empat tahap oleh Tim Medis. Dari skrining tersebut bisa diketahui apakah mereka nantinya bisa disuntik vaksin atau tidak. Misalnya ada yang punya hipertensi nanti bisa disuntik atau tidak," ungkap Sekda DIY Drs K Barkara Aji MM di Keparitahan, Rabu (24/2).

Salah satu sasaran vaksinasi

tahap kedua di DIY diawali bagi 19.897 pedagang maupun pegawai toko yang berada di kawasan Malioboro. Vaksinasi massal perdana tersebut bakal digelar di tiga lokasi yaitu Pasar Beringharjo, Museum Benteng Vredeburg dan Taman Parkir Abu Bakar Ali.

Sementara Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih mengatakan, kasus terkonfirmasi Covid-19 harian di DIY masih bertambah 201 kasus menjadi 27.023 kasus pada Rabu (24/2). Kasus sembuh bertambah 253 menjadi 20.820 kasus. Sedangkan kasus meninggal bertambah enam menjadi 658 kasus dari hasil verifikasi data Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Menurut Berty, case recovery rate (CRR) atau tingkat kesembuhan mencapai 77,05 persen dan case fatality rate (CFR) atau tingkat fatalitas kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebesar 2,43 persen. Untuk ketersediaan tempat tidur (TT) di 27 Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 DIY total tercapai 910 bed dengan TT yang tercapai sekitar 50 persen. (Ria/Ira)-f

## SAKSI

### 35 Juta Masker Kain Akan Dibagikan

**JAKARTA (KR)** - Guna mencegah dan mengurangi dampak Covid-19, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yakni membagikan 35 juta masker kain kepada masyarakat Indonesia. Masker kain yang merupakan produk dalam negeri ini akan didistribusikan melalui TNI-Polri untuk diberikan ke masyarakat.

"Pemberian 35 juta masker kain ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan masyarakat menggunakan masker secara masif dan salah satunya adalah membagikan serta mengajak masyarakat memakai masker. Selain itu masker yang diberikan adalah masker yang bisa dicuci, memenuhi syarat karena memiliki tiga lapis. Masyarakat bisa digunakan berulang dan juga bisa mencucinya," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara penyerahan bantuan 35 juta masker, secara virtual, di Jakarta, Rabu (24/2).

Menurut Airlangga, diharapkan pendistribusian masker kain ini akan bisa diselesaikan pada pertengahan bulan Maret 2021. Saat ini kasus aktif atau terkon-

firiasi Covid-19 secara nasional selama 2 minggu ini atau sejak diberlakukannya PPKM mikro mengalami penurunan sebesar 14.000 kasus di 123 kabupaten kota dan 7 provinsi. Bahkan 5 provinsi berhasil menurunkan jumlah yang terkonfirmasi Covid-19 yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, 35 juta masker kain yang akan dibagikan kepada masyarakat ini merupakan produksi dari industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri baik yang berskala besar maupun skala industri kecil dan menengah (IKM).

Dijelaskan, dukungan kepada industri tekstil dan pakaian jadi ini sangat penting. Pasalnya industri ini selama tahun 2020 atau selama pandemi Covid-19 mendapat tekanan yang cukup tinggi. Dimana angka pertumbuhannya minus 8,8 persen, sementara ekspornya minus 17 persen, sedangkan tenaga kerja minus 13 persen. (Lmg)-f